



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia

Mochamad Farhan Hidayat*, Deky Aji Suseno

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Jl. Taman Siswa, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ^{1,*}mfarhanhidayat19@students.unnes.ac.id, ²Dekyajisuseno@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: mfarhanhidayat19@students.unnes.ac.id

Submitted: 13/08/2025; Accepted: 23/08/2025; Published: 25/08/2025

Abstrak—Keberlanjutan fiskal menjadi isu penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik tanpa menimbulkan beban defisit yang berkepanjangan. Kabupaten/kota di Jawa Barat menghadapi tantangan ketergantungan tinggi pada transfer pusat serta ketidakseimbangan antara pendapatan asli daerah dan belanja publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Keberlanjutan fiskal dalam penelitian ini diproksikan melalui posisi fiskal nominal (selisih antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah), di mana nilai positif menunjukkan surplus dan nilai negatif menunjukkan defisit. Penelitian ini menggunakan data panel dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2018–2022, dengan variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Rasio Belanja Daerah (RBD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan model Common Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD (Prob. = 0,0804), DAK (Prob. = 0,0136), dan RBD (Prob. = 0,0004) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal. Sebaliknya, DAU berpengaruh positif signifikan (Prob. = 0,0463), sementara PDRB tidak berpengaruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dan DAK cenderung mendorong belanja yang lebih besar sehingga memperburuk posisi fiskal, sejalan dengan teori flypaper effect dan fiscal illusion. Sementara itu, DAU justru berperan dalam memperbaiki posisi fiskal daerah. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya pengelolaan belanja yang lebih disiplin agar tambahan pendapatan dapat benar-benar memperkuat keberlanjutan fiskal daerah.

Kata Kunci: Keberlanjutan Fiskal; Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Rasio Belanja Daerah; PDRB.

Abstract—Fiscal sustainability has become an important issue for local governments as it reflects their ability to finance public services without creating a prolonged deficit burden. Regencies and cities in West Java face challenges of high dependence on central government transfers and imbalances between local revenue and public expenditure. This study aims to analyze the factors influencing fiscal sustainability of regencies and cities in West Java Province. Fiscal sustainability in this study is proxied by the nominal fiscal position (the difference between total regional revenue and total regional expenditure), where a positive value indicates a surplus and a negative value indicates a deficit. This research employs panel data from 27 regencies/cities in West Java during the 2018–2022 period, with independent variables consisting of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Regional Expenditure Ratio (RBD), and Gross Regional Domestic Product (GRDP). Data were analyzed using panel regression with the Common Effect Model. The results show that PAD (Prob. = 0.0804), DAK (Prob. = 0.0136), and RBD (Prob. = 0.0004) have a negative and significant effect on fiscal sustainability. In contrast, DAU has a positive and significant effect (Prob. = 0.0463), while GRDP has no significant effect (Prob. = 0.3325). These findings indicate that increases in PAD and DAK tend to encourage greater spending, thereby worsening the fiscal position, consistent with the flypaper effect and fiscal illusion theories. Meanwhile, DAU contributes positively to improving the fiscal position. The results emphasize the need for more disciplined expenditure management so that additional revenues can effectively strengthen local fiscal sustainability.

Keywords: Fiscal Sustainability; Local Own-Source Revenue; General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Regional Expenditure Ratio; GRDP.

1. PENDAHULUAN

Keberlanjutan fiskal merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesehatan keuangan suatu daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan menentukan prioritas pembangunan, namun juga menuntut tanggung jawab yang besar dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Ketidakmampuan menjaga keseimbangan fiskal secara berkelanjutan dapat menimbulkan risiko defisit yang berkepanjangan, membatasi kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik, dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah (Bastida et al., 2019). Oleh karena itu, studi mengenai determinan keberlanjutan fiskal menjadi krusial untuk memastikan efektivitas pengelolaan APBD dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Keberlanjutan fiskal dalam literatur internasional umumnya didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan intertemporal antara pendapatan, belanja, dan kewajiban fiskal di masa depan (Bastida et al., 2019; Afonso & Jalles, 2019). Indikator yang sering digunakan adalah rasio utang terhadap PDB atau fiscal reaction function yang menilai respon kebijakan fiskal terhadap dinamika utang. Namun, pada level pemerintah daerah di Indonesia, data terkait utang daerah sangat terbatas, bahkan sebagian besar kabupaten/kota tidak memiliki komponen utang jangka panjang dalam APBD mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indikator keberlanjutan fiskal berupa posisi fiskal nominal (surplus/defisit), yaitu selisih antara total pendapatan daerah dengan total belanja



daerah. Indikator ini telah digunakan dalam penelitian fiskal daerah untuk menilai kesehatan fiskal jangka pendek (Ansori et al., 2021; Bastida et al., 2019).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, namun di sisi lain menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberlanjutan fiskalnya. Dengan 27 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang beragam, provinsi ini menjadi representasi nyata dari kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Kesenjangan antara daerah dengan PAD tinggi dan daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat menjadi salah satu isu penting yang memengaruhi keberlanjutan fiskal. Data APBD menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam posisi fiskal daerah selama periode 2016–2024, yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan anggaran dan perlunya kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya.

Beberapa penelitian mendukung temuan serupa. Darmawati dan Jafar (2024) menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian fiskal, namun transfer (DAU/DAK) menunjukkan efek negatif signifikan karena dapat mengurangi kemandirian dan mendistorsi perilaku fiskal daerah. Studi lainnya oleh Andriani & Mahi (2015) menegaskan pentingnya efisiensi belanja dalam menjaga kesehatan fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam konteks optimalisasi belanja publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2022) mengungkapkan bahwa DAK memiliki efek positif pada pembiayaan sektor prioritas, namun belum terbukti signifikan dalam memperbaiki posisi fiskal secara keseluruhan. Puspitasari dan Haryanto (2020) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan signifikan terhadap keseimbangan fiskal jangka panjang. Sementara itu, Prasetyo & Nugrahani (2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memperbaiki posisi fiskal, tetapi berpotensi menurunkan motivasi daerah dalam menggali PAD. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2022) menggarisbawahi bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali belum digunakan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan fiskal. Selain itu, Susanti dan Abdullah (2019) menegaskan pentingnya efisiensi belanja dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.

Studi internasional seperti yang dilakukan oleh Afonso & Jalles (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dapat memperbaiki posisi fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak. Oates (1972) dalam kajiannya tentang teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa kapasitas fiskal yang kuat harus didukung oleh tata kelola keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Rodríguez et al (2014) menekankan bahwa desentralisasi fiskal tanpa disertai peningkatan efisiensi belanja dapat memperburuk ketimpangan fiskal. Sementara itu, Bastida et al. (2020) menekankan bahwa efisiensi keuangan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal, terutama di daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Pendekatan internasional memberikan perspektif tambahan. Psycharis et al. (2016) membuktikan dalam konteks Yunani bahwa desentralisasi fiskal mendukung otonomi fiskal lokal. Aschauer (2000) dan Devarajan et al. (1996) menunjukkan bahwa struktur pengeluaran publik—termasuk belanja fisik dan investasi—menentukan efektivitas fiskal jangka panjang. Sementara itu, Guillamón et al. (2011) menemukan bahwa transparansi fiskal lokal meningkatkan disiplin fiskal di pemerintah daerah, yang berimbas langsung pada keberlanjutan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian juga memperkuat temuan tersebut. Berti & Halma (2021) menemukan bahwa PAD, DAU, dan efisiensi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan fiskal kabupaten/kota. Jayanti (2020) menambahkan bahwa alokasi belanja modal yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan fiskal melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Studi lain oleh Maggara, et, al (2024) menyoroti bahwa ketergantungan tinggi pada DAK dapat menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal jika alokasi tidak tepat sasaran.

Selain itu, penelitian oleh Rindy & Ririt (2025) ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat terbukti berkorelasi negatif dengan realisasi belanja modal, yang secara implisit menunjukkan potensi penurunan efisiensi dan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal. Selain itu, karakteristik daerah seperti basis pajak dan tingkat industrialisasi juga diperkirakan memengaruhi kapasitas fiskal, meskipun hubungan ini membutuhkan konfirmasi empiris. Studi internasional menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang berbasis pada prinsip transparansi dan good governance dapat memperkuat keberlanjutan fiskal, terutama di negara berkembang (Gupta et al, 2005). Namun, ketergantungan berlebihan pada transfer pusat tanpa peningkatan kemandirian fiskal berpotensi menurunkan insentif daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal. Safitri dan Widarjono (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan anggaran yang menunjukkan potensi bagi DAU untuk memperkuat kapasitas fiskal bila dikelola dengan baik. Temuan serupa disampaikan oleh Dhian et al. (2022) di Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa faktor efisiensi belanja menjadi penentu utama dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Lebih jauh, tinjauan sistematis oleh Siahay (2023) menunjukkan bahwa reformasi akuntansi publik yang transparan berpengaruh signifikan terhadap penguatan keberlanjutan fiskal. Sedangkan Abdul Jalil et al. (2012) membandingkan berbagai sistem pemerintahan dan menemukan bahwa stabilitas makro dipengaruhi oleh pola desentralisasi fiskal dan integritas institusional. Penelitian Ritonga et al. (2019) meneliti pengaruh kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia. Adnyana et al. (2022) menemukan bahwa surplus/defisit laporan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi ketahanan fiskal daerah. Namun demikian, studi-studi tersebut umumnya masih terbatas dalam mencakup semua variabel penting secara simultan, terutama pada konteks daerah yang spesifik seperti Provinsi Jawa Barat.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendapatan, transfer pusat, efisiensi belanja, dan kondisi ekonomi daerah. Namun, masih terdapat



perbedaan hasil temuan, khususnya terkait pengaruh parsial dari masing-masing variabel. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, periode penelitian, dan metode analisis yang digunakan.

Berdasarkan data rata-rata dari selisih pendapatan dan belanja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2024, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami tren defisit fiskal yang konsisten. Meskipun terdapat beberapa daerah yang mencatatkan surplus pada tahun-tahun tertentu, secara agregat nilai rata-rata keberlanjutan fiskal berada di bawah ambang batas sehat. Fluktuasi tertinggi terjadi pada tahun 2020–2021, yang bertepatan dengan pandemi COVID-19, di mana pendapatan daerah mengalami penurunan tajam sementara belanja publik meningkat signifikan untuk penanganan krisis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sari & Wati (2021) bahwa guncangan ekonomi eksternal dapat menurunkan kapasitas fiskal daerah dalam jangka pendek. Menariknya, meskipun pada 2022–2024 terjadi pemulihan pendapatan, rasio keberlanjutan fiskal belum sepenuhnya kembali ke tingkat pra-pandemi, yang menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan fiskal di beberapa daerah.

Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat, sekaligus lemahnya kapasitas daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, tren fluktuasi yang tajam dari tahun ke tahun juga mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan APBD, serta lemahnya perencanaan fiskal jangka menengah. Bila tren ini terus berlangsung, maka dapat menimbulkan risiko fiskal di masa depan, seperti pembiayaan defisit melalui utang daerah atau pengurangan belanja publik yang berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.

Permasalahan di atas menimbulkan pertanyaan penting: faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberlanjutan fiskal di tingkat kabupaten/kota? Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), efisiensi pengelolaan keuangan, dan kekuatan ekonomi daerah (diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) merupakan variabel yang secara teoritis dan empiris berpengaruh terhadap kondisi fiskal suatu daerah. Daerah yang memiliki PAD tinggi umumnya lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada transfer pusat. DAU dan DAK, meskipun penting, bisa menjadi sumber ketergantungan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal lokal. Sementara itu, efisiensi belanja mencerminkan kemampuan daerah dalam menggunakan anggaran secara optimal, dan PDRB menjadi indikator penting dalam mengukur basis ekonomi yang menopang fiskal daerah.

Dalam konteks penelitian ini, keberlanjutan fiskal diukur melalui posisi fiskal nominal, yaitu selisih antara total pendapatan daerah dengan total belanja daerah. Pendekatan ini sejalan dengan Bastida et al. (2019) dan Afonso & Jalles (2019) yang menekankan bahwa surplus/defisit absolut dapat menjadi indikator tekanan fiskal jangka pendek sekaligus cerminan kapasitas fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran. Meskipun banyak penelitian sebelumnya menggunakan rasio terhadap PDRB atau belanja sebagai ukuran standar (Guillamón et al., 2011; Psycharis et al., 2016), penggunaan nilai nominal relevan dalam penelitian ini karena lingkup analisis terbatas pada kabupaten/kota dalam satu provinsi, sehingga perbedaan ukuran APBD relatif lebih terkendali.

Dengan indikator ini, nilai positif (surplus) menunjukkan kondisi fiskal yang lebih sehat, sedangkan nilai negatif (defisit) menunjukkan risiko keberlanjutan fiskal. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan PAD dan DAK justru berhubungan negatif dengan posisi fiskal. Hal ini konsisten dengan fenomena flypaper effect (Gramlich, 1977; Hines & Thaler, 1995), di mana tambahan penerimaan fiskal cenderung langsung diikuti dengan peningkatan belanja yang lebih besar, sehingga memperburuk keseimbangan fiskal. Selain itu, fiscal illusion (Oates, 1988) menjelaskan bahwa masyarakat maupun pemerintah daerah seringkali tidak menyadari biaya riil dari pendapatan tambahan, yang mengakibatkan ekspansi belanja tidak terkendali. Dengan demikian, hasil negatif ini bukanlah anomali, melainkan menggambarkan dinamika nyata dalam pengelolaan fiskal daerah di Indonesia.

Secara konseptual, studi ini mengacu pada Teori Federalisme Fiskal yang dikembangkan oleh Oates (1972). Teori ini menekankan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, daerah yang memiliki kewenangan fiskal dan insentif untuk meningkatkan pendapatannya akan terdorong untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemandirian fiskal, yang tercermin dari tingginya PAD, menjadi indikator keberhasilan dari implementasi desentralisasi fiskal. Teori ini juga menyiratkan bahwa desain transfer fiskal dari pusat ke daerah (seperti DAU dan DAK) harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan moral hazard dan ketergantungan fiskal.

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada Teori Ekonomi Kelembagaan, khususnya pendekatan yang dikemukakan oleh North (1990), yang menekankan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal suatu entitas tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas institusi dan tata kelola yang ada. Dalam konteks pengelolaan fiskal daerah, institusi berperan dalam membentuk insentif, regulasi, dan kontrol yang akan menentukan apakah anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien. Daerah dengan tata kelola fiskal yang baik akan lebih mampu menjaga kesinambungan fiskalnya meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, efisiensi keuangan dan efektivitas belanja tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga merupakan hasil dari kualitas kelembagaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, Rasio Belanja Daerah, dan PDRB terhadap keberlanjutan fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2016 hingga 2024. Dengan menggunakan pendekatan data panel dan teknik regresi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam memperkaya literatur fiskal daerah, maupun secara praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan.



2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal-komparatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan hasil yang objektif melalui pengolahan data numerik dan analisis statistik.

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk panel, yaitu kombinasi antara data lintas wilayah (cross-section) dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan data runtut waktu (time-series) selama periode 2016–2024. Total observasi dalam penelitian ini sebanyak 243. Sumber data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dan Portal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberlanjutan fiskal (Y) yang diproksikan melalui posisi fiskal nominal (surplus/defisit), dihitung sebagai selisih total pendapatan daerah dan total belanja daerah (dalam miliar rupiah). Pemilihan indikator ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, keterbatasan data utang daerah membuat penggunaan rasio utang terhadap PDRB tidak memungkinkan di level kabupaten/kota. Kedua, indikator ini telah digunakan dalam studi fiskal daerah sebagai ukuran tekanan fiskal jangka pendek (Bastida et al., 2019; Ansori et al., 2021). Dengan definisi ini, nilai positif menunjukkan surplus (lebih berkelanjutan), sedangkan nilai negatif menunjukkan defisit (kurang berkelanjutan).

Variabel independen terdiri dari lima indikator utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Rasio Belanja Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memperhalus distribusi data dan menyesuaikan skala antar variabel, PAD, DAU, dan DAK ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln). Definisi operasional setiap variabel dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Keberlanjutan Fiskal (Y)	Tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan anggaran secara berkelanjutan, diukur dari selisih antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah (surplus/defisit).	Miliar Rupiah
LNPAD (X1)	Penerimaan daerah dari sumber asli daerah (pajak, retribusi, dll.).	Ln (Rupiah)
LND AU (X2)	Transfer dari pusat yang bertujuan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.	Ln (Rupiah)
LND AK (X3)	Transfer pusat untuk kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional.	Ln (Rupiah)
Rasio Belanja Daerah (X4)	Rasio Total Belanja terhadap Total Pendapatan Daerah. Menggambarkan tingkat efisiensi belanja; semakin tinggi rasio, semakin boros.	Persen (%)
PDRB (X5)	Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah.	Triliun Rupiah

2.4 Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Pemilihan model estimasi terbaik antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (Gujarati, 2006). Model yang terpilih kemudian diuji menggunakan serangkaian uji asumsi klasik. Model persamaan regresi yang diestimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNPAD_{it} + \beta_2 LND AU_{it} + \beta_3 LND AK_{it} + \beta_4 RBD_{it} + \beta_5 PDRB_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberlanjutan fiskal (Y_{it}) yang diukur melalui selisih antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah (dinyatakan dalam miliar rupiah) pada kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t . Variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ($LNPAD_{it}$), yaitu logaritma natural PAD kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t ; Dana Alokasi Umum ($LND AU_{it}$), yaitu logaritma natural DAU kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t ; serta Dana Alokasi Khusus ($LND AK_{it}$), yaitu logaritma natural DAK kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t . Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan Rasio Belanja Daerah (RBD_{it}), yaitu perbandingan antara total belanja dengan total pendapatan daerah pada kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t , sebagai proksi inefisiensi fiskal. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto ($PDRB_{it}$) digunakan untuk merepresentasikan kapasitas ekonomi daerah pada kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t . Adapun ε_{it} merepresentasikan error term yang menangkap faktor-faktor lain di luar model.



2.5 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Rasio Belanja Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap keberlanjutan fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Keberlanjutan fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja publik secara konsisten dan berkesinambungan, tanpa menimbulkan risiko beban fiskal di masa depan maupun ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat.

PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah melalui penerimaan pajak, retribusi, dan sumber lain yang dikelola langsung. Secara teori, semakin tinggi PAD diharapkan dapat memperbaiki keberlanjutan fiskal karena memperluas ruang fiskal. Namun, literatur menunjukkan fenomena flypaper effect (Gramlich, 1977; Hines & Thaler, 1995) dan fiscal illusion (Oates, 1988) yang menyebabkan peningkatan PAD seringkali diikuti dengan kenaikan belanja lebih besar daripada tambahan penerimaan. Dengan demikian, peningkatan PAD justru dapat memperburuk posisi fiskal. Penelitian Bastida et al. (2019) juga menemukan bahwa tanpa disiplin belanja, peningkatan PAD tidak selalu memperkuat keberlanjutan fiskal.

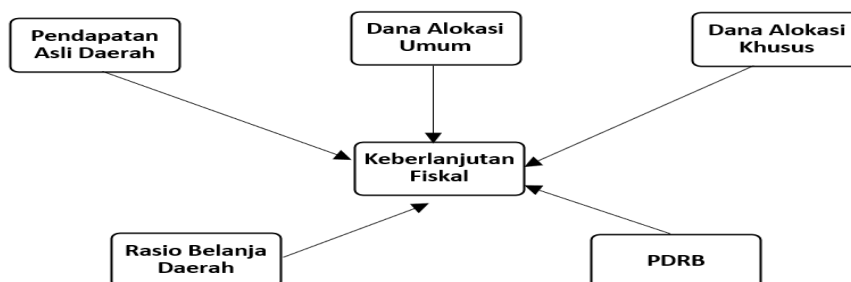
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam kerangka teori fiskal, DAU dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama bagi daerah yang PAD-nya relatif rendah. Menurut Bastida & Benito (2006), transfer fiskal yang dikelola secara efektif mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung kesinambungan layanan publik. Namun, Gupta et al. (2005) mengingatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada DAU tanpa disertai peningkatan kemandirian fiskal justru dapat mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokalnya. Penelitian Firmansyah (2022) menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika penggunaannya difokuskan pada belanja produktif yang dapat meningkatkan basis pajak di masa depan. Dengan demikian, DAU dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, asalkan dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. DAK biasanya bersifat earmarked sehingga penggunaannya terbatas pada sektor atau proyek tertentu. Menurut Jayanti (2020), meskipun DAK dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sifatnya yang spesifik membuat kontribusinya terhadap fleksibilitas fiskal daerah relatif terbatas. DAK yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi belanja modal dan secara tidak langsung memperkuat posisi fiskal daerah. Namun, jika perencanaan dan pengelolaannya kurang optimal, DAK berpotensi membebani anggaran, karena meskipun transfer tersebut menambah kapasitas fiskal daerah, efek riilnya justru dapat memperburuk keberlanjutan fiskal apabila peningkatan belanja yang menyertainya lebih besar dari manfaat fiskal yang diperoleh. Dengan demikian, hubungan DAK terhadap keberlanjutan fiskal sangat bergantung pada kapasitas perencanaan dan manajemen keuangan daerah, serta disiplin fiskal dalam mengelola tambahan dana transfer tersebut.

Rasio Belanja Daerah digunakan sebagai proksi ketidakefisienan fiskal. Semakin tinggi rasio ini berarti belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan yang tersedia, sehingga menandakan pemborosan fiskal. Menurut Musgrave (1977), efisiensi fiskal tercapai apabila pemerintah mampu menyeimbangkan antara sumber penerimaan dan kebutuhan belanja. Guillamón et al. (2011) menemukan bahwa peningkatan belanja yang tidak terkendali secara signifikan memperburuk posisi fiskal daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat, yang secara tidak langsung memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa perkembangan ekonomi akan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Penelitian Dhian et al. (2022) menemukan bahwa PDRB memiliki hubungan positif dengan keberlanjutan fiskal, meskipun besarnya pengaruh sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak daerah. Wardhani & Payamta (2020) juga menegaskan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung memiliki posisi fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan PDRB menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

Dengan demikian, kelima variabel ini memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan fiskal sebagaimana dijelaskan oleh kerangka teori yang digunakan, sehingga layak diuji secara empiris untuk mengetahui signifikansi pengaruhnya di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teori (Gambar 1) dan tinjauan empiris yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini berlandaskan pada Teori Federalisme Fiskal yang menjelaskan berbagai instrumen pendapatan daerah dan Teori Ekonomi Kelembagaan yang menekankan pentingnya kualitas tata kelola dalam memengaruhi efektivitas instrumen tersebut. Berdasarkan kedua teori tersebut, diduga bahwa masalah keberlanjutan fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat ditentukan oleh interaksi antara kemampuan daerah menghasilkan pendapatan, efisiensi dalam mengelola belanja, serta kapasitas ekonomi regionalnya. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa hipotesis untuk diuji secara statistik sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan fiskal.

PAD merupakan sumber pendapatan utama yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memperkuat posisi fiskal daerah, meskipun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan efek ilusi fiskal (fiscal illusion) yang mendorong peningkatan belanja melebihi tambahan pendapatan (Oates, 1988; Bastida et al., 2019).

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap keberlanjutan fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat.

DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antar daerah. Transfer ini diharapkan dapat membantu daerah membiayai belanja rutin dan mengurangi ketimpangan fiskal. Beberapa penelitian menemukan bahwa DAU memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah (Afonso & Jalles, 2019).

H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat.

DAK dialokasikan untuk mendukung sektor prioritas nasional di daerah. Meskipun sifatnya earmarked dapat memperkuat pembangunan, dalam praktiknya DAK juga berpotensi memicu fenomena flypaper effect, di mana tambahan transfer justru meningkatkan belanja lebih besar daripada tambahan pendapatan yang diterima (Gramlich, 1977; Hines & Thaler, 1995). Oleh karena itu, pengaruh DAK terhadap keberlanjutan fiskal perlu diuji secara empiris.

H₄ : Rasio Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat.

Rasio Belanja Daerah dalam penelitian ini diprosikan melalui rasio belanja terhadap pendapatan, di mana rasio yang tinggi mengindikasikan tingkat inefisiensi (boros) yang lebih besar. Semakin efisien pengelolaan keuangan daerah, semakin baik posisi fiskalnya, sehingga hubungan efisiensi dengan keberlanjutan fiskal diperkirakan negatif (Guillamón et al., 2011; Psycharis et al., 2016).

H₅ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap keberlanjutan fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat.

PDRB mencerminkan kapasitas ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan PDRB diharapkan dapat memperkuat basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan PDRB tinggi cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan fiskalnya (Devarajan et al., 1996; Aschauer, 2000).

H₆ : LNPAD, LNDAU, LNDAK, Rasio Belanja Terhadap Pendapatan, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode pengamatan 2016-2024 (N=243).

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev.
Keberlanjutan Fiskal	243	-496.580	497.290	-12.68058	151.329
LNPAD	243	18.0110	22.0740	20.2169	0.83692
LNDAU	243	19.1474	21.6212	20.7758	0.45739
LNDAK	243	18.0377	21.1994	19.7647	0.63781
RBD	243	87.0000	148.0000	100.798	5.85680
PDRB	243	2.7700	293.6600	56.1253	62.3401

Berdasarkan Tabel 2, Keberlanjutan Fiskal (Y) sebagai variabel dependen memiliki nilai maksimum sebesar 497.290 Miliar Rupiah dan nilai minimum -496.580 Miliar Rupiah, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar -12.68058 Miliar Rupiah dan standar deviasi 151.329. Nilai rata-rata yang negatif ini mengonfirmasi adanya masalah defisit fiskal secara umum di Jawa Barat.

Variabel independen LNPAD memiliki nilai minimum 18.0110 dan nilai maksimum 22.0740, dengan rata-rata sebesar 20.2169 dan standar deviasi 0.83692. Untuk LNDAU, nilai rata-ratanya adalah 20.7758 dengan standar deviasi 0.83692. Sementara itu, LNDAK memiliki nilai rata-rata 19.7647 dengan standar deviasi 0.63781. Variabel Rasio Belanja Daerah memiliki nilai minimum 87% dan nilai maksimum 148%, dengan nilai rata-rata 100.798% dan standar



deviasi 5.85680. Terakhir, variabel PDRB dengan nilai minimum 2.7700 Miliar Rupiah dan nilai maksimum 293.6600 Miliar Rupiah dengan nilai rata-rata 56.1253 dan standar deviasi 62.3401, yang menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas ekonomi yang signifikan antar daerah di Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Pemilihan Model Estimasi

Uji spesifikasi model digunakan guna menentukan pemilihan model regresi panel yang sesuai. Selanjutnya, uji awal yang dilakukan yaitu uji spesifikasi model yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM (Lagrange Multiplier). Berikut disajikan pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.868471	-26,211	4,532639
Cross-section Chi-square	24.705.205	26	3,720139

Hasil uji Chow pada Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,5357 ($> 0,05$). Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model FEM dengan CEM, sehingga model yang sesuai adalah Common Effect Model (CEM). Karena hasil Uji Chow telah menunjukkan bahwa CEM adalah model terbaik, maka pengujian tidak dilanjutkan ke uji Hausman maupun uji LM.

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

Model CEM yang terpilih kemudian diuji secara diagnostik untuk memastikan terpenuhinya asumsi-asumsi klasik agar hasil estimasi bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen.

Tabel 4. Hasil uji Multikolinearitas

	LNPAD	LND AU	LND AK	RBD	PDRB
LNPAD	1.000000	0.511470	0.465698	-0.158442	0.784674
LND AU	0.511470	1.000000	0.827393	-0.131382	0.373654
LND AK	0.465698	0.827393	1.000000	-0.098709	0.384008
RBD	-0.158442	-0.131382	-0.098709	1.000000	-0.041439
PDRB	0.784674	0.373654	0.384008	-0.041439	1.000000

Berdasarkan hasil analisis matriks korelasi, ditemukan bahwa nilai korelasi antar variabel independen seluruhnya berada di bawah ambang batas wajar (0.90), dengan nilai tertinggi antara LND AU dan LND AK sebesar 0.827. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas yang serius.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada satu periode dengan periode sebelumnya. Berdasarkan jumlah observasi ($n=243$) dan variabel independen ($k'=5$), nilai kritis dari Tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5% adalah $dL = 1.697$ dan $dU = 1.828$. Hasil estimasi model menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.901600. Karena nilai DW ini lebih besar dari batas atas ($dU = 1.828$) dan lebih kecil dari ($4 - dU = 2.172$), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi bebas dari autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah varians dari residual atau kesalahan pengganggu bersifat konstan (homoskedastis) atau tidak konstan (heteroskedastis) di seluruh observasi. Adanya heteroskedastisitas tidak menyebabkan bias pada nilai koefisien regresi, namun menyebabkan standard error menjadi tidak akurat, sehingga hasil uji signifikansi (Uji t) menjadi tidak dapat dipercaya. Pengujian dilakukan menggunakan Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas Likelihood ratio sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini mengandung gejala heteroskedastisitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, estimasi model dilakukan ulang dengan menggunakan metode yang dapat menghasilkan standard error yang robust atau kebal terhadap adanya heteroskedastisitas. Metode yang digunakan adalah Robust Standard Errors dengan opsi White cross-section di EViews. Pendekatan ini merupakan praktik standar dalam ekonometrika untuk memastikan bahwa uji hipotesis tetap valid meskipun asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi (Gujarati, 2006). Oleh karena itu, seluruh hasil regresi dan uji hipotesis yang disajikan pada bagian selanjutnya adalah hasil dari model yang telah dikoreksi.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.468.643	4.635.973	5.324.974	0.0007
LNPAD	-2.711.465	1.355.106	-2.000.924	0,55833333
LND AU	5.601.762	2.512.641	2.229.432	0,32152778
LND AK	-4.898.106	1.555.487	-3.148.920	0,09444444



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RBD	-2.119.833	3.626.028	-5.846.156	0.0004
PDRB	0.140621	0.136334	1.031.444	2,30902778
R-squared	0.667771	Mean dependent var		-1.268.058
Adjusted R-squared	0.660762	S.D. dependent var		1.513.299
S.E. of regression	8.814.085	Akaike info criterion		1.182.013
Sum squared resid	1841208.	Schwarz criterion		1.190.638
Log likelihood	-1.430.146	Hannan-Quinn criter.		1.185.487
F-statistic	9.527.254	Durbin-Watson stat		1.901.600
Prob(F-statistic)	0.000000			

Setelah model dipilih dan dikoreksi untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap keberlanjutan fiskal. Pengujian ini meliputi Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Signifikansi Simultan (Uji F), dan Uji Signifikansi Parsial (Uji t).

3.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.6607. Nilai ini mengindikasikan bahwa sekitar 66.07% dari variasi pada variabel Keberlanjutan Fiskal mampu dijelaskan oleh kelima variabel independen (LNPAU, LNDAU, LNDK, Rasio Belanja Daerah, dan PDRB) secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 33.93% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

3.1.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan nilai Prob(F-statistik) sebesar 0.000000. Karena nilai ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan Fiskal.

3.1.6 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil Uji t pada Tabel 5 di atas, dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap keberlanjutan fiskal.

Variabel LNPAU berpengaruh negatif pada tingkat $\alpha = 10\%$ (Prob. = 0.0804). Variabel LNDAU berpengaruh positif pada tingkat $\alpha = 5\%$ (Prob. = 0.0463), sedangkan variabel LNDK berpengaruh negatif pada tingkat $\alpha = 5\%$ (Prob. = 0.0136). Variabel Rasio Belanja Daerah menunjukkan pengaruh negatif pada tingkat $\alpha = 1\%$ (Prob. = 0.0004). Sementara itu, variabel PDRB tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap keberlanjutan fiskal (Prob. = 0.3325).

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5, bagian ini akan membahas secara mendalam pengaruh dari setiap variabel independen terhadap keberlanjutan fiskal di Provinsi Jawa Barat, dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan penelitian terdahulu.

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (LNPAU) terhadap Keberlanjutan Fiskal

Hasil analisis menunjukkan bahwa LNPAU berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$ (Prob. = 0.0804), sehingga menolak hipotesis pertama (H_1). Temuan ini, meskipun bertentangan dengan teori konvensional yang menyatakan PAD seharusnya memperkuat posisi fiskal, dapat dijelaskan melalui kerangka Teori Ekonomi Kelembagaan. Peningkatan PAD tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan fiskal jika tidak diimbangi dengan kualitas tata kelola belanja yang baik. Fenomena ini bisa mengindikasikan adanya fiscal illusion atau spending euphoria, di mana peningkatan pendapatan justru memicu peningkatan belanja yang lebih besar dan tidak produktif. Temuan ini menggarisbawahi argumen Reza et al. (2024) di mana peningkatan PAD sering diikuti oleh lonjakan belanja daerah menggambarkan fenomena spending euphoria mempertegas bahwa tambahan sumber pendapatan tidak otomatis memperbaiki keberlanjutan fiskal tanpa tata kelola belanja yang cermat. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah PAD, tetapi juga pada kualitas belanja publik yang didanai PAD tersebut, agar tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.

3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (LNDAU) terhadap Keberlanjutan Fiskal

LNDAU ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal (Prob. = 0.0463), yang mendukung hipotesis kedua (H_2). Sesuai dengan Teori Federalisme Fiskal, DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal dan menjadi penopang utama operasional pemerintah daerah. Sebagai dana transfer yang tidak



terikat (block grant), peningkatan DAU secara langsung menambah sisi pendapatan dalam persamaan Pendapatan - Belanja, sehingga secara mekanis meningkatkan surplus atau mengurangi defisit anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Dhian et al. (2022) yang juga menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dalam mendukung kapasitas belanja daerah, yang secara tidak langsung menopang stabilitas fiskal.

3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (LNDK) terhadap Keberlanjutan Fiskal

DAK ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal (Prob. = 0.0136). Meskipun pada dasarnya DAK ditujukan untuk membiayai program prioritas nasional, sifatnya yang bersyarat dan memerlukan dana pendamping justru dapat membebani APBD. Apabila kapasitas fiskal daerah terbatas, penerimaan DAK dapat meningkatkan rigiditas anggaran dan mengurangi fleksibilitas fiskal. Hal ini sejalan dengan temuan Afrizal & Khoirunurrofik (2022) yang menyebutkan bahwa efektivitas DAK sangat bergantung pada kemampuan perencanaan dan manajemen fiskal daerah. Dalam konteks teori flypaper effect, tambahan DAK juga berpotensi meningkatkan belanja secara tidak proporsional, sehingga justru menurunkan keberlanjutan fiskal.

3.2.4 Pengaruh Rasio Belanja Daerah terhadap Keberlanjutan Fiskal

Variabel Rasio Belanja Daerah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal. Hal ini logis karena semakin tinggi rasio belanja terhadap pendapatan berarti semakin boros (inefisien) pengelolaan fiskal, sehingga memperburuk posisi fiskal daerah. Temuan ini mendukung penelitian Guillaumón et al. (2011) serta Psycharis et al. (2016) yang menegaskan bahwa pembengkakan belanja publik yang tidak sebanding dengan pendapatan akan meningkatkan risiko defisit dan menurunkan keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, hasil ini menggarisbawahi pentingnya pengendalian belanja agar tetap sejalan dengan kapasitas pendapatan.

3.2.5 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Keberlanjutan Fiskal

Variabel PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik (Prob. = 0.3325), sehingga menolak hipotesis kelima (H₅). Hal ini mengindikasikan bahwa besaran output ekonomi suatu daerah tidak secara langsung berimplikasi pada kesehatan fiskal pemerintahnya. Hasil ini berbeda dengan beberapa studi seperti Lhutfi & Sugiharti (2022) yang menemukan PDRB berpengaruh signifikan. Namun, ketidaksignifikan ini dapat dijelaskan karena pengaruh PDRB kemungkinan besar bersifat tidak langsung; dampaknya telah terserap oleh variabel pendapatan seperti LNPAD, mengingat PDRB merupakan basis utama dari mana PAD digali. Korelasi yang cukup tinggi antara PDRB dan LNPAD dalam data ini (0.785) juga mendukung interpretasi tersebut.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan fiskal pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2024 dengan menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rasio Belanja Daerah (RBD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan fiskal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan PAD dan DAK tidak selalu memperbaiki posisi fiskal karena adanya fenomena flypaper effect dan rigiditas belanja, sedangkan peningkatan DAU mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Adapun rasio belanja yang tinggi mencerminkan inefisiensi pengelolaan anggaran yang secara langsung memperburuk keberlanjutan fiskal. Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini menegaskan relevansi teori federalisme fiskal dan teori ekonomi kelembagaan dalam menjelaskan perilaku fiskal pemerintah daerah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu indikator keberlanjutan fiskal berbasis surplus/defisit nominal sehingga belum sepenuhnya menangkap dimensi jangka panjang, seperti beban utang atau proyeksi belanja modal. Selain itu, variasi struktural antar daerah mungkin belum seluruhnya terakomodasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas indikator keberlanjutan fiskal dengan pendekatan multiaspek serta memasukkan variabel kelembagaan dan kualitas tata kelola untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan keberlanjutan fiskal di daerah.

REFERENCES

- Abdullah, S. (2004). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Kinerja Journal of Business and Economics*, 8(2), 209–210. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Afonso, A., & Jalles, J. T. (2019). Fiscal Rules and Government Financing Costs. *Fiscal Studies*, 40(1), 71–90. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12182>
- Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik, K. (2022). Examining Flypaper Effect in Indonesia: Evidence After Transferring Urban-Rural Land and Building Tax to Locals Government. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.465-478>
- Al, A., Nasir, N., Yossi, D., & Syukriy, A. (2021). The Role of Revenues in Reducing Local Government Fiscal Distress: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance*, 8(6), 597–0607. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0597>



- Aschauer, D. A. (2000). Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity, Finance, and Efficiency. *Economic Development and Cultural Change*, 48(2), 391–406. <https://doi.org/10.1086/452464>
- Bastida, F., Benito, B., & Guillaumon, M.-D. (2019). Tax mimicking in Spanish municipalities: expenditure spillovers, yardstick competition, or tax competition? *Public Sector Economics*, 43(2), 115–139. <https://doi.org/10.3326/pse.43.2.1>
- Bastida, F. J., & Benito, B. (2006). Financial reports and decentralization in municipal governments. *International Review of Administrative Sciences*, 72(2), 223–238. <https://doi.org/10.1177/0020852306064611>
- Benito, B., Guillaumon, M., & Bastida, F. (2015). Budget Forecast Deviations in Municipal Governments: Determinants and Implications. *Australian Accounting Review*, 25(1), 45–70. <https://doi.org/10.1111/auar.12071>
- Bird, R. M., Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1977). Public Finance in Theory and Practice. *The Canadian Journal of Economics*, 10(3), 524. <https://doi.org/10.2307/134487>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I. M. (2017). Financial Sustainability in Local Governments: Definition, Measurement and Determinants. In *Financial Sustainability in Public Administration* (pp. 57–83). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7_3
- Bohn, H. (1998). The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963. <http://www.jstor.org/stable/2586878>
- Darmawati, D., & Jafar, R. (2024). PENGARUH PENDAPATAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 5(01), 44–59. <https://tes-ojs.uin-alaudinn.ac.id/index.php/icor/article/view/51031>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2)
- Devi Utami Rika Safitri, & Widarjono, A. (2023). Analisis efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum Kabupaten atau Kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art15>
- Dewana Pinasthika Lestari, & Sakti, R. K. (2024). FISCAL SUSTAINABILITY IN INDONESIA: A FISCAL REACTION FUNCTION APPROACH. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2), 568–588. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.18>
- Farida, A., & Nugraha, R. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11, 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v1i12.7644>
- Febrianti, C., & Adnyana, I. G. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Surplus/Defisit Laporan Keuangan Pada Ketahanan Fiskal Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 141–150. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1266>
- Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. *Journal of Business Economics*, 92(3), 467–516. <https://doi.org/10.1007/s11573-022-01081-0>
- Gramlich, E. M. (1998). Intergovernmental grants: A review of the empirical literature. *International Library of Critical Writings in Economics*, 88, 274–294.
- Guillaumon, M.-D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The Determinants of Local Government's Financial Transparency. *Local Government Studies*, 37(4), 391–406. <https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588704>
- Gujarati. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga* (Edisi Ke 3). Erlangga.
- Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24(3), 441–463. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2005.01.004>
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.217>
- Jalil, A. Z. A., Harun, M., & Mat, S. H. C. (2012). Macroeconomic instability and fiscal decentralization: An empirical analysis. *Prague Economic Papers*, 2, 150–165. <https://doi.org/10.18267/j.ppep.416>
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Khairunisa, D. R., Saftiana, Y., & Sari, R. (2024). Pengaruh Kemandirian Dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 9152–9158. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10488>
- Lestari, R. P., & Sri Setiawati, R. I. (2025). Belanja Modal Daerah : Dinamika Ketergantungan Fiskal, PAD, dan SiLPA di Kabupaten Gresik. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11287>
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2023). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.48133>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Oates, W. E. (1985). On the nature and measurement of fiscal illusion: A survey. Department of Economics, University of Maryland College Park, MD.
- Oates, W. E. . (1972). Fiscal federalism [by] Wallace E. Oates. Harcourt Brace Jovanovich.
- Pertiwi, D., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2022). The Effect of Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund on Economic Growth with Capital Expenditures as a Moderating Variable in Regencies and



- Cities in North Sumatra Province. *International Journal of Research and Review*, 9(7), 172–186. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220719>
- Pertiwi, I. P., Camalia, N. D., Rega, R., & Kartiasih, F. (2023). MENCERMATI PENGARUH UTANG DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP SUSTAINABILITAS FISKAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 185–193. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i2.12259>
- Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262–280. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614153>
- Raksaka Mahi, B. (2015). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2004-2013 Tety Andrianil Kementerian Sekretariat Negara. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/efisiensi-belanja-pemerintah-daerah-dan-dampaknya-terhadap-pertum>
- Reza, M. D., Fahri, J., Amiro, S., & Ahmad, A. C. (2024). The Fiscal Illusion: A Regional Paradox of Mining Resources (Study on Regencies/Cities in North Maluku). *Journal of International Conference Proceedings*, 7(2), 620–636. <https://doi.org/10.32535/jicp.v7i2.3749>
- Ríos, A., Guillamón, M., Benito, B., & Bastida, F. (2018). The influence of transparency on budget forecast deviations in municipal governments. *Journal of Forecasting*, 37(4), 457–474. <https://doi.org/10.1002/for.2513>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., & López Subirés, M. D. (2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Saleh, R. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2023). Stimulus or Enforcement? How Intergovernmental Transfers Crowd-in Local Taxes in Indonesia. *Public Finance Review*, 51(6), 782–837. <https://doi.org/10.1177/10911421231191961>
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Satria Maggara, T., Kharisma Putri, B., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL (Vol. 6, Issue 4). <https://journalversa.com/s/index.php/jmd>
- Siahay, A. Z. D. (2023). AKUNTANSI PUBLIK SEBAGAI PILAR TATA KELOLA KEUANGAN: KAJIAN LITERATUR TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH.
- Sundari, A. D., & Pramesti, W. (2025). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(2), 1671–1683. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14907>
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>
- Wardoyo, D. U., & Jatmiko, A. H. (2024). The influence of fiscal decentralization, accountability, and financial performance on the level of corruption in Indonesian provincial governments. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 949. <https://doi.org/10.29210/020244441>
- Zulhendra, & Fadilla. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 163–171. <https://doi.org/10.31933/chemq992>